

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 9 dan 17

Dishub Kirim Tim Belajar ke Jatim

▶ Parkir Berlangganan akan Diterapkan di Kota Semarang

STORY HIGHLIGHTS

- Dishub Kota Semarang sedang mengkaji konsep penarikan retribusi parkir umum berlangganan dan parkir meter
- Untuk menerapkan itu, Dishub mengirim tim untuk studi banding ke Jawa Timur
- Dengan parkir berlangganan, diharapkan target retribusi parkir Rp 15 miliar dapat tercapai

SEMARANG, TRIBUN -Pemkot Semarang serius menyikapi adanya kebocoran retribusi parkir sehingga target pencapaiannya tidak pernah tercapai. Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang sedang mengkaji konsep penataan parkir dan mekanisme penarikan retribusi parkir umum di tepi jalan. Dalam waktu dekat, Dishub akan menerapkan sistem parkir berlangganan yang dirasa cocok dengan kondisi Kota Semarang sehingga tak terjadi kebocoran pendapatan dari parkir. Kepala Dishub Kota Semarang, M Khadik menuturkan, ada dua konsep penarikan retribusi

Dishub Kirim...

■ DARI HALAMAN 9

parkir umum yang sedang dikajinya. Yaitu parkir berlangganan dan parkir meter. Hanya saja, dari keduanya dirasa parkir berlangganan yang memungkinkan untuk diterapkan.

"Mengacu rekomendasi ketua DPRD dan Satlantas Polrestabes, parkir ini titik strategis dan harus ditata. Dan parkir berlangganan menjadi salah satu pilihan untuk kami terapkan," kata Khadik, Kamis (24/5).

Untuk mempersiapkan konsep tersebut, Khadik telah mengirim tim untuk melakukan studi banding ke 24 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang sudah menerapkan sistem parkir berlangganan. Studi banding tersebut sudah dilakukan beberapa waktu lalu dan saat ini tinggal proses kajian untuk menentukan format yang tepat.

"Kami sudah kirim tim untuk belajar sistem parkir berlangganan yang sudah dilaksanakan di 24 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Kajian sudah selesai, tinggal memilih format yang tepat," paparnya.

Sebelum menerapkan sistem parkir berlangganan, Khadik menjelaskan, Dishub melakukan pendataan mengenai titik parkir di Kota Semarang terlebih dahulu. Ada dua kategori parkir yaitu parkir berizin dan tidak berizin. Parkir berizin pun ada dua jenis yaitu yang masih berlaku izinnya dan yang sudah kedaluarsa.

Terlebih, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan target pendapatan daerah dari sektor parkir umum naik menjadi Rp 15 miliar pada 2018 ini. Target tersebut naik hampir empat kali lipat dibanding target 2017 lalu yang hanya Rp 4 miliar.

"Apalagi sekarang target retribusi parkir tepi jalan umum naik menjadi Rp 15 miliar dari tahun lalu Rp 4 miliar. Mau tidak mau kami

harus melakukan upaya optimalisasi pendapatan parkir dan penataan parkir agar tertib sehingga tidak mengganggu lalu lintas," jelasnya.

Penerapan konsep parkir berlangganan atau parkir meter ini sekaligus untuk meminimalisir kebocoran pendapatan retribusi parkir umum padahal potensinya sangat besar. Pada 2017 lalu, parkir umum hanya menyumbang Rp 2,5 miliar dari target Rp 4 miliar.

"Tahun ini harus sudah kita terapkan. Agar akhir tahun 2018, target pendapatan parkir bisa terpenuhi," tandasnya.

Lebih lanjut Khadik memaparkan, dengan pola parkir berlangganan, nanti masyarakat cukup membayar biaya berlangganan pada saat melakukan perpanjangan STNK. Kendaraan yang berlangganan nanti akan dipasang barcode sehingga kendaraan tersebut akan terdeteksi saat parkir di lokasi parkir yang disiapkan.

Kemudian, tidak semua lokasi parkir nantinya akan menjadi lokasi parkir berlangganan. Dishub akan menata parkir mana saja yang dipertahankan dan mana yang harus dihilangkan. Dishub berpijak pada apakah titik parkir itu mengganggu lalu lintas atau tidak.

"Kemudian juru parkir nanti kita gaji sesuai UMK. Ini untuk memangkas birokrasi yang selama ini ada. Mereka tidak menerima uang cash langsung tapi mereka menggunakan alat yang dipersiapkan. Jadi tugas juru parkir hanya menata kendaraan di lokasi parkir yang kami atur," paparnya.

Di samping itu, dalam format parkir berlangganan ada yang berbeda. Yaitu kendaraan akan dicover asuransi. Sehingga kalau ada kendaraan yang hilang maka akan diganti. Akan te-

tapi kalau parkirnya di luar titik yang ditetapkan Dishub Kota Semarang maka akan menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan itu sendiri.

"Penataan dan mekanisme ini agar Kota Semarang tertib, lancar lainnya dan pendapatan asli daerah dari sektor parkir umum juga meningkat," ujarnya.

Lalu bagaimana dengan kendaraan dari luar kota? Khadik mengatakan, saat ini masih dikaji lebih lanjut termasuk juga besaran biaya langganan selama satu tahun. Jika melihat Perda, biaya parkir untuk sepeda motor Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000 untuk satu kali parkir.

"Kami akan melihat kajian tarifnya dulu. Termasuk Perdana itu apakah kita masih pakai atau perlu dikaji karena kami harus melihat kondisi sekarang," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, retribusi parkir umum merupakan pos primadona untuk meningkatkan PAD Kota Semarang. Namun karena kebocoran penerimaan retribusi parkir yang besar, sehingga penerimaan retribusi tidak mencapai target.

"Realisasinya masih terjadi kebocoran yang besar. Parkir umum yang sangat berpotensi itu justru tidak mencapai target penerimaan untuk PAD," kata Supriyadi, di gedung DPRD Kota Semarang.

Supriyadi mengusulkan agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang memberlakukan sistem parkir berlangganan. Dengan sistem tersebut maka nantinya akan memutus mata rantai penerimaan retribusi parkir mulai dari juru parkir, pemilik area parkir, petugas penarik retribusi baru.

"Kalau diberlakukan parkir berlangganan, saya optimistis PAD dari parkir umum bisa mencapai Rp 20 miliar dalam setahun," ucapnya. (nal)